



Buletin

Parlementaria

Nomor 966/1/VII/2017 • Juli 2017

POSKO PENGADUAN PANSUS ANGKET KPK



HARI WAKT... IMAT...
5625 FAX : (02... .go.id

**Ketua DPR Tinjau
Kesiapan Brexit**

**Sejumlah Tokoh
Dukung Pansus KPK**

Pansus KPK Resmi Buka Posko Pengaduan

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



Pimpinan dan Anggota Pansus Angket KPK

Pansus KPK Resmi Buka Posko Pengaduan

Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah dan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK secara resmi membuka posko pengaduan Pansus Angket KPK.

“Posko ini bukan tempat penyelesaian kasus. Melainkan untuk menampung aspirasi terkait penyimpangan tugas dan kewenangan KPK,” ujar Ketua Pansus KPK Agun Gunanjar Sudarsa kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurut Agun, Posko pengaduan ini adalah tempat untuk menampung berbagai pihak yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK. Pihak-pihak itu yang mendapatkan bentuk pelayanan publik dari KPK, yang dirasakan perlu dilaporkan kepada Pansus.

Agun menambahkan, hal-hal yang dapat dilaporkan kepada posko ini seperti proses penanganan yang tidak ditindaklanjuti atau pun proses tertentu yang terambil alih, atau hak-hak tertentu yang direlemisir. Agun memastikan, posko ini diadakan bukan untuk pengaduan penyelesaian kasus.

“Posko ini sebagai bentuk dukungan terhadap Pansus Angket KPK dalam rangka menjalankan tugas

penyelidikannya. Tugas penyelidikan itu yang objeknya adalah tugas dan kewenangan KPK, dalam melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,” jelas Agun.

Selain itu, jelas politisi F-PG itu, posko pengaduan ini diadakan semata-mata dalam rangka menjalankan prinsip clean and good government, yang memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Sehingga dengan adanya posko ini, prinsip-prinsip itu bisa dijalankan.

Agun memamparkan, posko pengaduan ini sudah dilengkapi pengaduan secara online, yang bisa disampaikan melalui surat elektronik ke pansus_angketkpk@dpr.go.id. Selain itu, juga bisa melalui pos yang dialamatkan ke Ruang Posko Pengaduan Pansus Angket KPK, Gedung Nusantara III Lantai I, Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta, 10270.

“Bisa juga dilakukan pengaduan

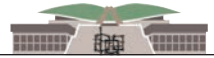
secara langsung ke posko. Nanti ada mekanisme yang diatur. Penerimaan di sini (posko), kemudian akan di deliver ke Lantai 2 Gedung Nusantara III, di sana ada pimpinan dan anggota yang bertugas. Kalau harus diterima dalam RDPU, maka akan dilaksanakan RDPU,” papar Agun.

Dalam kesempatan itu, Agun melaporkan, pihaknya telah menerima tiga laporan dari masyarakat. Laporan itu diantaranya terkait tebang pilihnya penyelesaian kasus kemudian soal panel KPK yang tidak fair, hingga permasalahan suap pada RAPBD di Sumatera Selatan.

“Laporan ini akan dikaji. Laporan yang memiliki korelasi dengan Pansus, akan kita tindaklanjuti,” pasti politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Fahri Hamzah mengapresiasi langkah inisiatif pansus. Ia berharap, langkah ini menjadi tonggak sejarah agar Indonesia bebas korupsi di masa mendatang. Peresmian posko ini juga dihadiri sejumlah Pimpinan dan Anggota Pansus Angket KPK. ■

(sf) foto: oje/hr



Meksiko Minta Dukungan Indonesia Untuk Pencalonan Ketua IPU

Meksiko meminta dukungan Indonesia untuk pencalonan Ketua Inter Parliamentary Union (IPU) atau Organisasi Parlemen Sedunia. Hal itu mengemuka saat Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Frederico Salas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Fadli Zon mengatakan, kedatangan Frederico untuk memberikan informasi serta meminta dukungan terkait pencalonan politisi Meksiko Gabriela Cuevas Barron sebagai Presiden Inter - Parliamentary Union (IPU) periode 2017-2020.

“Dubes Meksiko berkunjung untuk memberikan informasi seputar niat mereka untuk menjadi Ketua organisasi parlemen sedunia, karena memang periode ini adalah jatah bagi anggota Parlemen negara Amerika Latin untuk menjadi Presiden IPU,” jelas Fadli usai menerima Dubes Frederico Salas.

Lebih lanjut, Fadli menyampaikan, Meksiko berharap Parlemen Indonesia dapat mendukung kandidatnya dalam bursa calon pimpinan IPU, pada konferensi IPU mendatang yang akan berlangsung di Saint Petersburg. Ia menilai, dukungan Indonesia kepada Meksiko bisa saja mengalir, mengingat hubungan kedua negara sangat kuat dan telah berlangsung sejak lama.

Pada kesempatan yang sama, Dubes Meksiko juga menemui Ketua BKSAP sekaligus Ketua IPU Nurhayati Ali Assegaf. Pertemuan tersebut membicarakan hal yang sama terkait dukungan pencalonan Meksiko sebagai Ketua IPU.

Menanggapi hal tersebut, dia mengapresiasi langkah yang dilakukan Dubes Frederico Salas. Menurutnya, langkah tersebut merupakan sebuah tanda yang menunjukkan betapa pentingnya peran Indonesia di IPU.

Di sisi lain, Nurhayati mendukung pencalonan Gabriela Cuevas Barron sebagai salah satu kandidat perempuan. Artinya, selama ini seruannya untuk memberikan porsi lebih bagi keterwakilan perempuan didengarkan.

“Sebelumnya, di IPU, saya minta supaya ada presiden perempuan karena selama ini belum ada. Oleh karenanya, kemarin saya maju untuk memberikan contoh, artinya bahwa perempuan harus diperhitungkan kalau dia memang punya kapasitas dan potensi untuk menang. Saya senang karena semua kandidat adalah perempuan, artinya apa yang selama ini saya coba sosialisasikan di IPU di sambut baik,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, politisi dari F-Demokrat ini juga mengundang Gabriela Cuevas Barron untuk menghadiri dan mengsosialisasikan pencalonannya pada forum World Parliamentarian yang akan diselenggarakan 6-7 September mendatang di Bali. ■



Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam Fadli Zon dengan Dubes Meksiko

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Rizka Arinindya, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moepoeni, Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurrahman, Abdul Kahfi S. Kom
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiyono
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Pusputa,
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Viafa Hafid mengunjungi kantor Telkomsel

Ketua DPR Berharap Tak Ada Gangguan Telekomunikasi

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Ketua DPR RI Setya Novanto berharap, masyarakat tidak dikhawatirkan dengan adanya gangguan telekomunikasi. Telkomsel sebagai salah satu provider dengan jumlah pelanggan yang sangat besar, harus mampu memberikan pelayanan yang prima, terutama saat terjadi lonjakan traffic di momen mudik dan Idul Fitri.

Demikian dikatakannya saat meninjau Kantor Pusat Telkomsel, di Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (21/6/2017). Dengan didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid (F-PG), Novanto diterima langsung oleh Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah dan jajaran Direksi Telkomsel.

“Jaringan Telkomsel adalah jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sidak ke Telkomsel ini untuk memastikan masyarakat tak mengalami gangguan dan bisa mendapatkan pelayanan komunikasi dan data yang baik, walaupun terjadi lonjakan drastis karena mudik dan Idul Fitri,” jelas Novanto

Dalam kesempatan itu, Novanto sempat meninjau control room Telkomsel, serta mendengar langsung laporan dari Kantor Regional Telkomsel untuk area Sumbagut, Lampung dan Jawa Tengah, melalui video conference.

“Saya dengar langsung dari Dirut Telkomsel, dan melihat langsung laporan dari beberapa daerah di Indonesia. Semua dalam keadaan yang sangat aman, sehingga kita harapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tidak ada ketakutan gangguan dalam berkomunikasi,” jelas Ketua Umum Partai Golkar itu.

Novanto pun memberikan pesan, agar

layanan data mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, momen mudik dan Idul Fitri, biasanya orang-orang akan mengupload berbagai foto ke sosial media.

“Jangan sampai lemahnya jaringan merusak kebahagiaan saudara-saudara kita yang ingin berbagi momen melalui sosial media,” imbuh politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur.

Novanto juga meminta agar di beberapa titik transit mudik, seperti rest area, bandara, stasiun, pelabuhan, terminal, tempat wisata, mendapatkan peningkatan pelayanan dari Telkomsel. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Telkomsel, sehingga membuat masyarakat menjadi aman ketika berkomunikasi.

“Mendengar dan melihat langsung kesiapan Telkomsel dalam menghadapi mudik dan Idul Fitri, membuat saya yakin pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik. Saya sangat mengapresiasi dan memberikan ucapan terimakasih kepada Telkomsel yang telah sigap bekerja keras memberikan pelayanan yang prima,” tutup Novanto.

Sementara itu, Direktur Utama Telkomsel Ririeq Adriansyah mengatakan dalam menyambut Hari Raya ini, pihaknya sudah menyiapkan BTS Fix dan compact mobile base station (Combat) atau mobile BTS.

“Kami memiliki 838 Point of Interest (POI), dimana titik itu yang akan dikunjungi atau dilalui oleh masyarakat yang melakukan perjalanan, baik itu mudik, silaturahmi, maupun berwisata,” jelas Ririeq.

Selain network atau jaringan, Ririeq memastikan pihaknya juga menyiapkan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan Telkomsel. Untuk memudahkan pelanggan Telkomsel yang membutuhkan pelayanan, pihaknya menyiapkan Grapari, baik yang dikelola oleh Telkomsel sendiri, maupun Grapari dari mitra Telkomsel.

“Kita juga menyebar hampir 500 mobile Grapari ke berbagai daerah. Total tahun ini ada sekitar 11 ribu kilometer rute, kita perkuat dan kita pastikan bahwa layanan Telkomsel bisa prima pada saat menjelang dan setelah lebaran nantinya,” harap Ririeq. ■

(sf/sc) Foto: Jayadilhr

Posko Angket KPK Dorong Isu Anti Korupsi Bersama

Pembentukan Posko Pengaduan Hak Angket KPK menjadi suatu medium bagi perdebatan nasional yang orkestratif. Palsanya, melalui Posko ini diharapkan dapat muncul isu anti Korupsi bersama yang melibatkan semua orang di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah mengatakan, pengaduan yang datang dari masyarakat secara online atau surat menyurat. karena itu, saya membayangkan angket ini akan menjadi medium bagi perdebatan nasional yang orkestratif sehingga semua orang memikirkan bagaimana memberantas korupsi itu.

“Saya sebagai pimpinan sangat mengapresiasi inisiatif Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK yang membentuk posko pengaduan angket KPK ini,” ujar Wakil Ketua DPR Korkesra Fahri Hamzah, di Gedung DPR RI, Senin, (19/6).

Fahri menjelaskan, inisiatif DPR ini dalam rangka membuka perdebatan yang luas di tengah masyarakat terkait isu korupsi, sehingga akan banyak orang yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Salah satu keberhasilan pansus adalah semakin banyak orang yang memiliki isu anti korupsi.

“Isu anti korupsi harus menjadi milik semua orang. Suatu bangsa yang

ingin maju, dengan anti korupsi harus menjadi gaya hidup, bukan hanya pada pejabat atau masyarakat, tapi semuanya,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra itu meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memberikan dukungan secara umum kepada Pansus, dan secara khusus kepada posko pengaduan. Seperti fasilitasi staf ataupun dokumentasi data-data.

“Semoga ini iktiar mulia yang menjadi satu tonggak sejarah besar bangsa kita, dimana yang masa akan datang, Indonesia bisa bebas korupsi. Negara yang menggapai kemajuan yang tinggi, karena standar dari kesadaran kita, indeks persepsi korupsi kita menjadi baik di masa mendatang,” harap politisi asal dapil NTB itu.

Sebelumnya, Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, posko pengaduan ini bukan tempat penyelesaian kasus. Melainkan untuk menampung aspirasi terkait penyimpangan tugas dan kewenangan KPK. ■

(sf) Foto: Ojilhr



Wakil Ketua DPR bidang Korkesra Fahri Hamzah bersama Pimpinan dan Anggota Pansus Hak Angket KPK

Ketua DPR Tinjau Kesiapan Brexit

Untuk memastikan arus balik lalu lintas pada lebaran tahun 2017 ini berjalan lancar, Ketua DPR Setya Novanto meninjau kesiapan dan kondisi lalu lintas di gerbang tol keluar Brebes Timur atau yang dikenal dengan nama Brexit.

“Insya Allah, dengan manajemen yang semakin bagus, insiden penumpukan kendaraan di Brexit yang terjadi tahun lalu bisa dihindari. Adanya flyover yang selesai dibangun mengarah ke Kabupaten Purwokerto bisa mengurangi beban Brexit. Saya minta kepolisian juga terus siaga membantu memperlancar arus kendaraan dan meminimalisir kemacetan,” kata Politisi F-Golkar saat meninjau gerbang tol Brexit di Brebes, Senin (19/6/2017).

Seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, Novanto sapaan akrabnya, menyaksikan sendiri secara langsung kondisi jalan di jalur Kabupaten Tegal, Brebes, Cirebon, dan sebaliknya yang semakin membaik. Ini tentu memudahkan arus kendaraan para pemudik.

Dari hasil pantauan arus lalu lintas di Tol Brexit ini, kendaraan yang melintas masih berjalan normal. Belum terlihat adanya kepadatan dari pemudik. Diprediksi kepadatan terjadi pada h-3 Lebaran.

Novanto juga mengimbau, agar para pemudik berhati-hati, karena jalan tol ini masih berupa cor beton dan belum diaspal, “Saya harap para pemudik meningkatkan kewaspadaan dalam mengemudi. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutupnya.

Sementara itu, Kanit Laka Lantas IPDA Zaenudin memaparkan, jika terjadi kepadatan maka akan dibuat menjadi empat jalur di Gerbang Tol Brebes Timur. “Kalau nanti dua jalur tidak mampu menampung, kita akan buka menjadi empat jalur. Jadi Brexit satu arah dan Brebes Barat satu arah. Jika Brexit agak padat, langsung diarahkan ke Pantura,” terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan membuat rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan dengan mengarahkan para pemudik keluar tol Ujungrusi, Balamoa, dan Warureja yang terletak di Kabupaten Tegal. Sedangkan, untuk sarana dan prasarana di exit tol Brebes ini sudah ada penambahan rest area dan mobil derek. ■

(Jaka/Sa) Foto: Jaka/hr



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Anggota DPR Mujib Rohmat meninjau Tol Brexit



DPR Minta Frekuensi Penerbangan ke Bandara Ahmad Yani Ditambah

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto meminta Angkasa Pura I untuk menambah frekuensi penerbangan ke Bandara Ahmad Yani Semarang menjadi 24 jam. Oleh karena itu, Angkasa Pura I diminta segera menyelesaikan perbaikan Runway.

Hal tersebut diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan jajaran PT. Angkasa Pura I di Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/6/2017).

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menilai sejauh ini persiapan Angkasa Pura I di Bandara Ahmad Yani sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu. Namun menurutnya salah satu yang menjadi kendala di Bandara Ahmad Yani ini adalah minimnya jumlah penerbangan ke Semarang.

Hal ini, tegasnya, mengakibatkan slot penerbangan menjadi padat dan rapat sekali, sehingga tidak sedikit yang mengalami kemunduran keberangkatan bahkan hingga membatalkan perjalanannya.

"Kendala-kendala ini mudah-mudahan di tahun depan bahkan selanjutnya dengan adanya pembangunan bandara yang baru dapat segera menyelesaikan permasalahan ini. Dan untuk 24 jam sebenarnya tidak terlalu sulit karena ini hanya berhubungan dengan runway yang mengalami perbaikan berupa pelapisan ulang pada pukul 24.00," jelas politisi dapil Jateng ini.



Wakil Ketua DPR bidang Korinbang Agus Hermanto meninjau perbaikan Runway Bandara Ahmad Yani

Namun, menurutnya, ini bisa dilakukan sebelum memasuki Ramadhan. "Saya mendorong kepada pihak Angkasa Pura I untuk secepatnya menyelesaikan ini. Jadi rasanya tahun depan harusnya bisa, tahun depan harus bisa 24 jam. Kalau 24 jam kami yakin slotnya makin banyak penerbangannya," tutur Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Ia menegaskan mudik merupakan tradisi leluhur yang harus dipersiapkan sedemikian rupa. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah dalam hal ini Angkasa Pura I dan Air Nav untuk dapat melakukan pengamanan dan pengawasan secara kontinuitas demi terjalannya mudik nikmat, nyaman dan aman. ■

(ndy/sc)

Bahas Isu Korupsi, Fahri Pimpin Delegasi ke Korsel

Korea Selatan (Korsel) termasuk negara yang sangat baik dalam pemberantasan korupsi. Indonesia perlu banyak belajar menangani isu ini. KPK di Korsel termasuk transformatif.



Wakil Ketua DPR bidang Korkesra Fahri Hamzah menerima Dubes Korsel

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan hal ini di ruang kerjanya usai menerima Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Senin (19/6/2017). Rencananya, Fahri akan memimpin delegasi DPR RI ke Korsel untuk bahas isu pemberantasan korupsi dengan parlemen, KPK, dan Ombudsman Korsel.

"Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Korsel. Kali ini saya akan fokus membahas isu anti-korupsi. Ini merupakan tema lama yang kita ingin bekerja sama dengan mereka. Nanti saya akan bertemu dengan parlemen untuk bahas isu ini. Saya juga akan bertemu dengan KPK Korsel. KPK-nya termasuk yang transformatif," tandas Fahri.

Dubes Korsel, tutur Fahri, bercerita banyak bagaimana pemerintah Korsel memberantas korupsi secara sistemik dan menjadi bagian dari orchestra bangsa. Memberantas korupsi bukanlah kesibukan individu. "Jadi korupsi itu baru bisa diberantas kalau sudah menjadi life style orang per orang secara personal. Untuk itu, saya akan ketemu dengan Ombudsmannya juga. Kita akan dalam ini untuk mencari peluang kerja sama yang lebih intensif dalam bidang ini," papar Fahri lagi.

Menurut politisi dari NTB ini, pemberantasan korupsi di Korsel terbilang sukses, tapi perekonomiannya juga sukses, tanpa terganggu agenda pemberantasan korupsi. Jangan sampai pemberantasan korupsi malah membuat para pengusaha takut berbisnis dan para pejabat publik takut mengambil kebijakan.

Di Korsel, Fahri akan didampingi Nurhayati (F-PPP) dan Sartono Hutomo (F-PD). Ia akan menghadiri acara Meeting of speakers of Euro Asian Countries Parliament. Acara tersebut bertajuk Promoting or interparliamentary Cooperation for Common Prosperity the Euro Asian Region yang digelar pada 26-28 Juni 2017. ■

(mh/sc); Foto: Oj/ahr

Indonesia Harus Terhindar dari Krisis Energi

Tantangan makro nasional adalah sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat menyampaikan Kuliah Umum Di Universitas Diponegoro Semarang, Jumat (16/6/2017) petang. Kuliah ini bertajuk 'Model Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan'. Tantangan makro nasional adalah sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat menyampaikan Kuliah Umum Di Universitas Diponegoro Semarang, Jumat (16/6/2017) petang. Kuliah ini bertajuk 'Model Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan'.

Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan, untuk bisa mensinkronkan, maka hal yang harus diperhatikan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran tahun 2018 adalah penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan. Terlebih lagi ungkap Taufik, saat ini telah terjadi ledakan jumlah penduduk yang sangat dahsyat. Sehingga akibat dari itu akan terjadi krisis. Kondisi krisis di sini menyangkut tiga hal, krisis energi, krisis pangan, dan krisis air.

"Krisis di sini menyangkut tiga hal. Konsumsi energi naik 41 persen di tahun 2035 berdasar estimasi jumlah penduduk 11 miliar orang. 2056 jumlah penduduk dunia sudah 14 setengah miliar. 2056 diperiksa energi fosil akan habis," ujar Taufik.

Sehingga dia menekankan, Indonesia harus terhindar dari krisis energi, pangan dan air. Dihadapan Rektor Undip, para Dekan, civitas akademika kampus dan para mahasiswa ia juga menjelaskan, saat ini dunia sedang mengalami suatu proses keseimbangan, untuk menuju pada posisi seimbang maka terjadilah transformasi kultural.



Wakil Ketua DPR bidang Korekku, Taufik Kurniawan

Transformasi kultural yang dimaksud oleh Taufik adalah, bisa terjadi di setiap lini kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Persoalan tersebut diakibatkan oleh jumlah penduduk dunia yang sangat padat. "Yang idealnya jumlah penduduk tiga sampai empat miliar. Terjadi perubahan penduduk yang sangat dahsyat," ungkap Taufik.

Karena jumlah penduduk dunia yang terus bertambah, sedangkan di sisi lain ketersediaan kebutuhan penduduk terbatas maka akan terjadi kelangkaan energi, pangan dan air. Dalam kondisi

kelangkaan energi, diprediksi akan terjadi pada 2056. Maka akan terjadi perubahan penggunaan energi dari fosil ke energi hayati.

Taufik mewanti-wanti, Indonesia sebagai negara tropis penghasil energi hayati harus mampu menjawab tantangan tersebut, jangan sampai malah menjadi korban keadaan dunia. "Adanya perubahan penggunaan energi fosil ke energi hayati, otomatis negara-negara yang berada di daerah tropis itu menjadi negara primadona. Incara bagi negara-negara industri untuk mendapatkan sumber energi hayati menggantikan energi fosil," papar Taufik.

Oleh sebab itu mumpung masih ada waktu, mulai saat ini, Taufik menyarankan agar perencanaan dan pelaksanaan APBN bisa diselaraskan. "Mensinkronkan apa yang ada di APBN antara apa yang ada di perencanaan dengan pelaksanaan

itu menjadi satu hal yang bisa diselaraskan. Sehingga efektivitas dari anggaran kita betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Taufik.

Untuk itu dia menyarankan dalam penyusunan RKP 2018, semestinya mengacu pada pendekatan perkuatan pelaksanaan kebijakan money follows program. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan memperhatikan pada perencanaan, perkuatan perencanaan

dan penganggaran untuk RKP 2018, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Taufik melanjutkan, tematik yang dimaksud adalah penekanan atau fokus perencanaan sampai dengan program prioritas. Holistik yakni pendekatan menyeluruh dan komprehensif dari hulu ke hilir. Integratif adalah integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan. Spasial yakni keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi. ■



Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, Fadli Zon bersama perwakilan Serikat Pekerja JICT

DPR Diminta Perjuangkan Aspirasi Serikat Pekerja PT JICT

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon menerima kedatangan perwakilan Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut pihak serikat pekerja PT. JICT menyampaikan berbagai aspirasinya, dan berharap DPR dapat meneruskan dan memperjuangkan segala aspirasi itu.

“Kami menerima aspirasi dari Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) di Pelindo II yang menyampaikan sejumlah hal. Dari hasil audit BPK yang telah disampaikan ada kerugian negara sejumlah Rp. 4,08 triliun. Mereka juga telah memprediksi sebelumnya dan perpanjangan yang tidak sesuai dengan aturan itu bisa merugikan negara sampai dengan Rp. 3,6 triliun,” jelas Fadli, Senin (19/06/2017).

Fadli mengatakan, Serikat Pekerja PT. JICT juga menginginkan agar DPR

bisa ikut menanyakan tentang sejauh mana proses hukum dari tersangka dalam masalah Pelindo II ini. Selain itu mereka juga berharap agar Pansus Pelindo dapat bekerja lebih optimal ke depannya, terkait dengan investigasi sejumlah hal yang masih belum dilakukan.

“Kami menyampaikan, Pansus sudah bekerja dan terus mengumpulkan data serta melakukan investigasi. Namun memang ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan oleh Pansus, termasuk misalnya soal audit itu, karena terkait dengan institusi atau lembaga asing,” ujarnya.

Mereka juga berharap agar Pansus Pelindo dapat bekerja lebih optimal ke depannya, terkait dengan investigasi sejumlah hal yang masih belum dilakukan.

Adanya hasil audit BPK yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian negara senilai Rp. 4,08 triliun, lanjut Fadli, hal itu menunjukkan bahwa Pansus memang telah bekerja dengan cukup serius, karena audit tersebut memang diminta oleh Pansus.

“Kita akan meneruskan aspirasi-aspirasi ini dan memperjuangkannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Pengelolaan PT. JICT di Pelabuhan Tanjung Priok maupun pelabuhan ditempat-tempat lainnya agar dilaksanakan oleh anak bangsa sendiri, dan tidak perlu oleh orang asing dari luar,” pungkasnya. ■

(dep.mp). Foto: Aniel/hr

PTS Harus Tingkatkan Kualitas

Banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang saat ini masih tertinggal standar nasional pendidikannya dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) khususnya di wilayah luar Pulau Jawa. Karena itu Pemerintah khususnya Kemenristek Dikti harus dapat mengatasi adanya disparitas atau kesenjangan mutu pembelajaran, sehingga dapat mendorong produktivitas dan Inovasi di PTS.

Banyaknya PTS yang ada di Indonesia menjadi alasan mengapa standar nasional pendidikan belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu yang juga menjadi persoalan adalah banyaknya program studi (prodi) yang tidak diterima di masyarakat.

“Kita memiliki sejumlah persoalan terkait hal ini. Memang jumlah Universitas di Indonesia terlalu banyak rasionya, ini yang membuat kualitas jadi terbatas,” terang Ledia Hanifa anggota Tim Kunjungan Kerja Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) di Balikpapan, Kamis (15/6).

Politisi Fraksi PKS tersebut meminta kepada PTS untuk menyesuaikan diri

dengan sistem nasional Perguruan Tinggi (PT), karena dengan itu secara umum akan meningkatkan kualitasnya. Agar nantinya juga dapat melahirkan lulusan yang berkualitas.

Bila regulasi sudah ada, harap Ledia, nantinya harus berjalan sesuai kesepakatan. Dengan demikian setiap PT akan dibuat regulasi yang berbeda beda sesuai kondisi geografis dan masyarakat yang ada.

“Saya berharap standar regulasi yang ada di PT bisa di implementasikan, mereka juga harus bekerja sama dengan dunia industri agar sudah dipastikan alumninya akan kerja dimana, akhirnya,” tekan Ledia menambahkan. ■

(Jaymp). Foto: Jayad/Inr



Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa



Anggota DPR RI Dapil Bali, Wayan Koster dan I Made Urip berfoto bersama para Guru UPT Kecamatan Pupuan Tabanan, Bali

Guru Kecamatan Tabanan Bali Sampaikan Aspirasi ke DPR

Anggota DPR RI daerah pemilihan Bali, Wayan Koster dan I Made Urip menerima kunjungan para guru UPT Kecamatan Pupuan Tabanan, Bali, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/06/2017).

“Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menerima para guru TK dan SD dari Kecamatan Pupuan Tabanan, yang datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan kesempatan untuk mengikuti Kelompok Kerja Guru (KKG), dan juga mengenai pembenahan karir

Kepala Sekolah,” ucap Wayan Koster.

Seperti diketahui, Kelompok Kerja Guru (KKG) sendiri adalah wadah pertemuan bagi para guru sekolah dasar yang tergabung dalam organisasi gugus sekolah. Pada hakekatnya fungsi KKG adalah sebagai wadah pembinaan profesional tenaga pendidik dalam bentuk kegiatan pembinaan profesional.

Selain itu juga sebagai wadah menumbuhkembangkan semangat kerjasama secara kompetitif dikalangan anggota KKG dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, dan juga sebagai tempat penyebaran informasi, inovasi, dan



Akreditasi Perguruan Tinggi Seperti Siklus Kemiskinan

Anggota Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengutarakan masih tingginya disparitas (perbedaan) antara Perguruan Tinggi (PT) di Jawa dengan luar Jawa terkait SN DIKTI. Di provinsi Kepulauan Riau (Kepri) persoalan disparitas antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) disebabkan antara lain kualitas dan jumlah dosen, minimnya sarana dan prasarana (sarpras) serta rendahnya minat riset dan penelitian.

“Kekurangan dosen perlu segera diselesaikan dengan redistribusi dosen-dosen berkualitas dari Jawa yang berlebih (surplus) ke Kepri,” usul Dadang di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Panja SN DIKTI ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (15/6/2017).

Politisi Hanura ini juga menerima masukan dari hasil pertemuan dengan beberapa Rektor di Batam bahwa akreditasi PTS di Kepri rendah masih C rata-rata disebabkan jumlah dosen S2 yang belum terpenuhi, juga masalah sarana dan prasarana. Selama ini hanya PTN yang mendapat bantuan sarpras dari pemerintah, sedangkan PTS yang berprestasi sering kali masih dianaktirikan.

“Akreditasi PT seperti siklus kemiskinan, berputar-putar terus, PT yang akreditasi C sulit beranjak karena memang kesulitan dan punya problem minimnya sarpras sehingga perlu bantuan, sementara pemerintah membuat regulasi PTS yang bisa memperoleh bantuan hibah sarpras harus memiliki akreditasi B,” papar Dadang.

Politisi Dapil Jawa Barat II ini menekankan perlunya perubahan regulasi agar tidak menciptakan ketidakadilan dalam proses akreditasi PT. Panja SN DIKTI punya peran penting untuk mengevaluasi, imbuhnya.

Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Agung Dhamar Syakti membeberkan masalah standar sumber daya manusia (dosen) sekitar 5000 dosen statusnya masih P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Pihaknya berharap Panja SN DIKTI Komisi X DPR mendorong pemerintah segera disahkan Keppresnya.

“Dosen yang diperbantukan dari PTN juga tidak bisa membantu dalam proses akreditasi, padahal sehari-harinya sudah berjibaku di kampus tersebut, kebijakan seperti ini juga perlu ditinjau ulang untuk mendorong percepatan akreditasi yang berkeadilan,” pungkas Agung. ■

(ojfe/sc), Foto: Ojfe/hr



Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana

pembinaan tenaga pendidik. Penumbuh rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik, sosial, kepribadian dan pedagogik.

Terbentuknya KKG diharapkan dapat memperlancar upaya peningkatan kemampuan profesional guru dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. “Hal itu sudah menjadi bagian dari kebijakan yang sedang dibahas oleh Komisi X DPR bersama dengan pemerintah,” pungkasnya. ■

(dep/sc), Foto: Arie/1hr

OTT pada Lembaga Penegak Hukum Jangan Terjadi Lagi

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap kasus operasi tangkap tangan (OTT) di lembaga penegak hukum tidak terjadi lagi. Terkait kasus OTT Kepala Seksi Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, beberapa waktu yang lalu, Arsul meminta Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan perhatian pada kasus itu.

“Soal OTT di lembaga penegak hukum, kami minta perhatian Jaksa Agung agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” kata Arsul, di sela-sela rapat dengan Kejaksaan Agung, Kemenkumham dan Polri, terkait pagu anggaran RAPBN 2018, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Politisi F-PPP itu menambahkan, pihaknya juga ingin melihat gambaran pembinaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan, agar hal-hal ini tidak terulang kembali.

“Jumlahnya barangkali tidak signifikan, tapi tamparan keras bagi nama baik Kejaksaan Agung. Kasus seperti ini murni oknum, tidak boleh digeneralisir di seluruh lingkungan Kejaksaan Agung,” tegas



Anggota Komisi III DPR Arsul Sani

politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebagaimana diketahui, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba terjerat operasi tangkap tangan di sebuah restoran di Bengkulu pada pekan lalu. Parlin ditetapkan tersangka oleh KPK usai diindiksi menerima sedikitnya Rp 160 juta dalam penanganan perkara di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu. KPK masih mendalami dugaan keterlibatan individu lain di kejaksaan Bengkulu.

Menanggapi hal itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku tak akan membela bawahannya yang terindikasi melakukan pelanggaran dan terjaring KPK. Menurutnya, kejaksaan akan terbuka membantu KPK menyidik kasus Parlin ini.

“Kita tidak akan menghalangi, menutupi, dan juga tidak akan membela. Silahkan saja KPK untuk mengembangkan, tidak ada persoalan bagi kita,” kata Prasetyo.

Namun ia meminta masyarakat tak menyorot dugaan suap tersebut dari sudut pandang insititusi. Menurut Prasetyo, pelanggaran masih terjadi meski upaya pencegahan internal sudah dilakukan.

“Selama ini tidak berhenti kami review (kasus-kasus pelanggaran jaksa) itu, tapi saya katakan jaksa jumlahnya puluhan ribu. Kalau ada satu atau dua orang (melanggar), itu ya oknum, jangan digeneralisir,” tegas Prasetyo. ■

(sf/mp), Foto: Ojji/hr

Tinjau Ulang Permendag Gula Kristal Melalui Pasar Lelang Komoditas

Anggota Komisi VI DPR RI Nasir Bahar menanggapi atas terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan RI No.16/M-DAG/PER/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas. Ia menginginkan Pemerintah untuk mengkaji dan meninjau ulang Permendag ini.

Nasir Bahar mengatakan Permen ini tercipta akibat ketidakmampuan Kementerian Perdagangan melaksanakan Peraturan Presiden tentang Tata Niaga Gula Rafinasi, karena masih ada beredar gula rafinasi ke pasar.

“Saya berharap perlu dikaji kembali terhadap Permendag ini, bahkan perlu ditinjau ulang, karena menciptakan dan menempatkan sejumlah keuntungan

kepada perusahaan yang sesungguhnya akibat dari surat dari kementerian ini,” kata Nasir Bahar, saat Raker Komisi VI dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Politisi Partai Amanat Nasional ini berpandangan, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan belum dapat menjadikan payung hukum yang mendasarkan pasar lelang gula kristas



Anggota Komisi VI DPR RI Nasir Bahar

rafinasi ini dibuat. Padahal selama ini juga tidak pernah terjadi percecokan antara produsen dengan industri mamin, tapi yang sering kita dengar dan terjadi adalah rembesnya gula kristal rafinasi ke pasar.

Menurutnya, rembesan ini adalah karena ketidakmampuan Kementerian

Perdagangan dalam melaksanakan Perpres 57 tentang tata niaga gula rafinasi. Maka dengan ketidakmampuan tersebut diciptakanlah sebuah bursa pasar lelang.

Lebih lanjut, Nasrir mengatakan, dengan menempatkan permendag dengan alasan takut rembes dari rafinasi ke pasar

maka di ciptakanlah bursa pasar lelang sehingga terciptalah sebuah perusahaan lelang. Yang diuntungkan dengan adanya Permendag ini, adalah perusahaan-perusahaan lelang komoditi tersebut. "Tata niaganya yang mengatur pola seperti ini jelas sangat-sangat tidak fair," tegasnya. ■

(es.mp), Foto: Jekka/hr

RUU SDA Hayati Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto meninjau pembangunan Bandara Ahmad Yani

Kami minta persetujuannya sekali lagi, apakah pengharmonisasian pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan DPR RI?"

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan DPR RI?" tanya Supratman. Serentak para anggota rapat menjawab setuju, lalu palu sidang diketuk sebagai tanda pengesahan.

Ketua Panja, Firman Soebagyo menjelaskan RUU ini berusaha mengatur tentang kekayaan alam Indonesia yang mempunyai wilayah kehutanan yang luas dan konservasi keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain pemerintah dan negara belum banyak hadir memberikan regulasi, akibatnya pencurian, penyelewengan oleh pihak asing rentan terjadi.

"Bisa dicuri oleh bangsa-bangsa lain, tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak positif bagi Indonesia, oleh karena itu undang-undang ini akan memberikan payung hukum, memberikan kepastian hukum yang kuat, termasuk pengaturan pada sanksi-sanksi," ungkap Firman. ■

(eko/sc), Foto: Nadya/hr

Sepuluh Fraksi di Badan Legislasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi RUU Usul Inisiatif DPR, Senin (19/6/2017) sore. Persetujuan ini didapat setelah rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tersebut, yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Ruang Rapat Baleg Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Setelah Ketua Panitia Kerja RUU ini, Firman Soebagyo menyampaikan laporannya pimpinan sidang menanyakan kepada setiap anggota perwakilan dari 10 fraksi yang ada.

Setiap fraksi menyampaikan pendapat mini fraksi, secara bergantian sepuluh fraksi dari PDI Perjuangan sampai Hanura dengan alasannya masing-masing

menyampaikan persetujuannya. Ketua Baleg menyimpulkan bahwa kesepuluh fraksi bersepakat untuk menyetujui pengharmonisasian ini, dan oleh karena itu dalam rangka memenuhi ketentuan tata tertib, RUU ini harus disetujui bersama.

"Kami minta persetujuannya sekali lagi, apakah pengharmonisasian pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang



Tim Kunspek BURT DPR meninjau RS Sentra Medika Mataram

BURT Pastikan RS Sentra Medika Mataram Siap Layani Dewan

Wakil Ketua DPR RI Agung Budi Santoso memastikan Rumah Sakit Sentra Medika Mataram siap memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota dewan dan keluarganya. Rumah Sakit Sentra Medika Mataram merupakan salah satu rumah sakit provider dari PT. Jasindo di Mataram.

“Sebagaimana yang dipaparkan oleh pihak RS Sentra Medika, RS Sentra Medika dengan fasilitas dan termasuk tenaga kesehatan siap melayani anggota dewan dan keluarganya. Tidak hanya itu saja yang kami tinjau, selain itu yang lebih penting adalah hubungan yang harmonis antara Jasindo dengan pihak rumah sakit. Karena ini mempengaruhi pelayanan nantinya,” kata Agung saat memimpin Tim BURT meninjau RS Sentra Medika di Mataram, Jumat (16/6/2017).

Pasalnya, jelas politisi Demokrat ini, jika hubungan PT. Jasindo dengan pihak rumah sakit tidak baik, tentunya pihak rumah sakit juga akan tidak baik pula

memberikan pelayanan kepada para anggota dewan yang memegang kartu Jamkestama VVIP. “Tadi dipaparkan sudah ada sosialisasi, sudah ada SOP. Artinya sudah betul, dan hubungan kerjasama Jasindo dengan pihak rumah sakit pun sudah berjalan dengan baik.

“Kita hanya ingin memastikan itu, karena kita ingin memberikan jaminan atau memberikan kepastian kepada 560 teman-teman kita di DPR bahwa kalau ada sesuatu terjadi di Mataram khususnya, Rumah Sakit Sentra Medika siap memberikan pelayanan, karena sudah kita tinjau sudah kita amati dan lakukan diskusi dengan pihak rumah

sakit,” paparnya.

Tapi lanjutnya, kalau hubungan itu tidak baik akan kita koreksi. “PT. Jasindo yang kita koreksi bukan pihak rumah sakitnya. Karena kita bermitra dengan Jasindo bukan dengan rumah sakit,” imbuhnya.

“Kalau ternyata belum ada sosialisasi belum ada SOP, belum ada kartu, Jasindo yang kita tegur, karena ini penting, karena ini berpengaruh pada pelayanan pada kami anggota dewan khususnya,” tegas anggota dewan dapil Jawa Barat ini.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama RS Sentra Medika Mataram dr. Roni Supatra,

Jika hubungan PT. Jasindo dengan pihak rumah sakit tidak baik, tentunya pihak rumah sakit juga akan tidak baik pula memberikan pelayanan kepada para anggota dewan yang memegang kartu Jamkestama VVIP.

MARS menyatakan bahwa pada intinya kerjasama antara rumah sakit dengan Jasindo sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kerjasama dengan Jasindo sudah berlangsung sejak tahun 2010. Tidak ada masalah dalam kerjasama ini. Baik klaim maupun informasi tentang database, dan upgrade database selalu dikomunikasikan.

“Selama ini, anggota DPR atau keluarganya yang berobat di sini ada namun tidak banyak, jadi terbatas karena mungkin keberadaan anggota dewan itu sendiri tidak di sini dan keluarganya pun ada disini tapi kadang menggunakan identitas yang lain tapi belakangan baru kita ketahui kalau itu keluarga dari anggota dewan, kemudian kita perbaiki, itu yang merupakan kendala kami yaitu masalah nama,” jelas Roni.

“Kadang daftar ke sini dengan nama lain atau nama sapaan dan yang mendaftarkan juga orang lain, itu kendala yang kami jumpai,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, 560 orang anggota DPR RI dan keluarganya diberikan jaminan kesehatan oleh pemerintah, dan asuransi yang menjalankan itu adalah PT. Jasindo. BURT DPR diberikan mandat untuk melihat bagaimana peran PT. Jasindo didalam mencari rumah sakit-rumah sakit yang dijadikan sebagai provider untuk melayani para anggota dewan dan keluarganya di seluruh Indonesia.

Selain fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit provider, patuh diketahui bagaimana hubungan atau pola kemitraan PT. Jasindo dengan rumah sakit-rumah sakit yang dijadikan providernya. Kalau tidak harmonis, misalnya pembayarannya sering terlambat, kalimnya sering telat tentunya akan mempengaruhi. ■

(sc), Foto: Ayu/hr

Sejumlah Tokoh Dukung Pansus KPK

Pansus Panitia Angket KPK-DPR RI mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat. Pansus diminta tak perlu takut terhadap pihak-pihak yang menentang pembentukan Pansus. Sebaliknya, justru KPK harus diawasi dan dikembalikan ke khittah-nya.



Pimpinan Pansus Hak Angket KPK bersama sejumlah tokoh untuk mengungkap kontroversi kasus besar yang ditangani KPK

Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar yang memimpin rapat pertemuan dengan sejumlah tokoh itu di ruang KK I Gedung Nusantara, Senin (19/6/2017). Para tokoh tersebut diantaranya Ichsanuddin Noorsy, Adhie Massardi, Marwan Batubara, Laode Ida, Habil Marati, Prijanto, dan lain-lain. Di hadapan para tokoh, Agun menegaskan, Miryam S Haryani adalah pintu masuk untuk mengungkap kontroversi kasus besar yang sedang ditangani KPK. Untuk itulah kehadirannya sangat diperlukan Pansus.

Pansus, ditegaskan Agun, tidak ingin mengintervensi KPK dengan meminta rekaman pemeriksaan Miryam. “Kami hanya ingin dengan pembentukan Pansus Angket ini ada objektivitas dan rasionalitas dalam penanganan sebuah perkara. Bukan didasari atas asumsi-asumsi yang berbeda satu sama lain. Miryam sendiri sudah mengakui tidak pernah menerima tekanan dari anggota Komisi III,” ungkap Agun.

Pansus ingin meluruskan kebohongan-kebohongan yang sempat beredar menyangkut kasus yang membelit Miryam. Pansus, sambung Agun, tidak akan menuding siapa pun yang melakukan kebohongan. Tapi, Pansus akan melakukan pemeriksaan di bawah sumpah atas keterangan pihak-pihak yang dipanggil. “Kalau ini tidak dilakukan, maka proses peradilan menjadi sesat adanya, karena didasarkan atas data dan fakta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.”

Sementara itu, Marwan Batubara salah satu tokoh masyarakat yang diterima Pansus mengatakan, banyak kasus besar yang dipetieskan KPK. Sebut saja, kasus RS Sumber Waras dan sengketa lahan Taman BMW yang tak disentuh KPK. Adhie Massardi menandakan, kerja KPK sudah jauh melenceng dari khittahnya sebagai lokomotif pemberantasan korupsi. Di sinilah pentingnya KPK bekerja sama dengan DPR.

Massardi bahkan menyebut, “KPK adalah produk reformasi, tapi DNA-nya dari Bank Dunia. Pansus harus maju terus. Kalau mundur akan berhadapan dengan rakyat.” Sedangkan ekonom Ichsanuddin Noorsy menegaskan, DPR punya alasan untuk mengawasi dan memeriksa kebijakan. Dan KPK sudah mengacaukan pola hubungan kelembagaan dengan surat jawabannya kepada Pansus.

Politik penyidikan yang dijalkan KPK, sambung Noorsy, bisa jadi untuk membongkar banyak tokoh politik di DPR. Untuk itu, kinerja KPK harus betul-betul diawasi dan anggaran yang diberikan juga harus berdasarkan kinerja. Senada dengan Noorsy, Laode Ida juga menyerukan perlu ada pembenahan pola hubungan kelembagaan. Dan KPK sebagai lembaga super body banyak mengacau pola hubungan tersebut. ■

(mh/sc), Foto: Kresna/hr



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih (tengah)

Sistem 144 SKS Bebani Mahasiswa

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR dalam kunjungannya ke Provinsi Jawa Tengah menerima keluhan banyaknya SKS (Sistem Kredit Semester) yang harus dicapai mahasiswa untuk menyelesaikan masa perkuliahan yang mencapai 144 SKS. Beban ini terlalu berat dan menghambat kreatifitas mahasiswa.

Hal itu mengemuka saat pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR dipimpin Wakil Ketua Abdul Fikri Faqih di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah Kamis (15/6). Hadir pula dalam acara ini rektor-rector kampus di Jawa Tengah meliputi Rektor Undip, Rektor Unsoed, UNS, Unes, Universitas Tidar, ISI Surakarta, Poltek Negeri Semarang, Poltek Maritim, Poltek Negeri Cilacap, Unkris Salatiga, Universitas Sultan Agung, Untag, Universitas Muria Kudus dan Universitas Pekalongan.

Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga John A. Titaly mengungkapkan, sistem 144 SKS tersebut terlalu membebani mahasiswa dan dosen sehingga mahasiswa tidak bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik dan dosen tidak bisa melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas mengajar.

Menanggapi hal itu Ketua Tim Kunspek Abdul Fikri mengatakan, kita terlalu terbebani oleh sistem SKS, dalam

4 tahun harus menyelesaikan 144 sks. Jika dibagi berarti dalam sepekan mahasiswa harus belajar selama 54 jam, padahal di kampus luar negeri dalam sepekan hanya 36 jam.

“Pantas lulusan luar negeri lebih kreatif dan lebih banyak melakukan penelitian, karena mereka punya space waktu. Berbeda dengan mahasiswa kita yang terlalu dibebani dengan 54 jam kerja dalam sepekan, dosen juga dibebani dengan banyak waktu mengajar sehingga waktu dosen untuk membuat penelitian berkurang. Kita akan mengevaluasi sistem ini dengan Menteri Ristek dan Dikti,” tutur politisi PKS ini.

Sedangkan anggota Tim Kunspek Mujib Rohmat menyoroti pemerintah yang tidak memiliki blue print jangka panjang untuk pendidikan, seiring pergantian menteri berbeda pula program yang dibuat sehingga membebani peserta didik. Ia juga menyoroti pendirian kampus politeknik yang seharusnya didirikan sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di sekitar kampus tersebut, sehingga ketika lulus kuliah mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan dan berperan membangun ekonomi di daerahnya. ■

(th.mp), Foto: Rryan/hr

DPR RI Tingkatkan Hubungan dengan Parlemen Chile

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menerima Duta Besar Chile untuk Indonesia, Gonzalo Mendoza di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). Nurhayati mengatakan, DPR RI ingin meningkatkan hubungan kerjasama dengan Parlemen Chile.

“Peningkatan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Chile, bukan cuma pemerintah, tapi juga antar kedua parlemen. Apa yang bisa ditingkatkan, atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh parlemen, supaya hubungan kedua negara lebih baik lagi,” jelas Nurhayati.

Politisi F-PD itu menambahkan, Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara parlemen Indonesia dengan

Chile pun sudah menindaklanjuti berbagai hubungan kerjasama antar kedua negara.

“Misalnya saat ini kita defisit ekspor ke Chile, melalui parlemen juga pembicaraan itu kita bahas. Chile juga menjadi pasar kita di Amerika Latin. Jadi itu penting untuk mempererat kerjasama antar kedua negara,” imbuh Nurhayati.

Apalagi, tambah Nurhayati pada Mei lalu, Presiden Chile Michelle Bachelet juga berkunjung ke Indonesia. Sehingga, hasil

Agun : Ini Persoalan Menata Politik Pencegahan Korupsi

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan, Pansus yang dipimpinnya sangat terbuka bagi semua kalangan, baik yang kontra maupun pro terhadap Pansus yang dibentuk DPR RI. Ini persoalan menata kembali politik pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Bagi DPR, Angket KPK ini adalah peluang dan kesempatan yang baik, tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tapi juga persoalan menata kembali politik pencegahan dan pemberantasan korupsi, agar menjadi semakin baik dan jadi milik semua pihak, bukan hanya KPK sendiri,” kata Agun usai memimpin rapat dengar pendapat Pansus dengan para tokoh masyarakat.

Ditegaskan Agun, Pansus akan bekerja objektif dan memanggil semua pihak yang berkepentingan. Siapa pun akan diminta keterangannya untuk membantu kerja Pansus. “Yang kontra kita undang, yang mendukung juga kita undang. Ini kesempatan bagi siapa pun. Jangan ada asumsi kami hanya memanggil mereka yang mendukung kami,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Ditambahkannya, kepentingan penegakan hukum, pemberantasan korupsi,

dan keadilan jadi yang utama. Tak ada tendensi apa pun di balik terbentuknya Pansus KPK tersebut. Tak perlu juga ada yang ditakutkan dengan Pansus KPK ini, karena berangkat dari visi dan kepentingan yang sama dalam memberantas korupsi. ■

(mh/sc), Foto: Rumi/hr



Rapat Tim Kunspek Komisi XI DPR dengan jajaran TPID dipimpin Wakil Ketua Marwan Cik Hasan terkait kondisi inflasi jelang hari raya, Jum'at (9/6).



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf menerima Dubes Chile

kunjungan itu juga perlu ditindaklanjuti oleh parlemen kedua negara.

Permasalahan global pun menjadi pembahasan dalam pertemuan. Misalnya terkait Trans Pacific Partnership (TPP) dan climate change. Dan kedua negara yang telah menjadi komunitas global, harus turun berperan dalam kepentingan masyarakat global.

“Kita sudah menjadi komunitas global, dan sebaiknya kita tidak lagi fokus pada entitas kita sendiri. Misalnya kelompok-kelompok regional. Tapi kita harus berpikir untuk kepentingan masyarakat global, untuk kesejahteraan rakyat masing-masing,” imbu Nurhayati.

Dalam kesempatan itu, politisi asal dapil Jawa Timur itu juga mendapat apresiasi dari Dubes Chile, terkait kiprah dirinya maupun badan yang ia pimpin dalam berbagai forum internasional, salah satunya dalam hal keterwakilan perempuan di segala level. ■

(sf/sc), Foto: Andri/hr

Persiapan Mudik Tahun 2017 Lebih Baik

Anggota Komisi V DPR Salim Fakhry menilai, persiapan mudik lebaran tahun 2017 ini oleh pihak-pihak terkait, jauh lebih baik dibanding tahun 2016. Namun, ia tetap berharap kepada petugas yang nantinya bertugas selama arus mudik maupun balik, dapat meningkatkan kinerja.

Hal itu dikatakannya saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi V DPR ke Provinsi Lampung dan Provinsi Banten, baru-baru ini. Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo (F-PKS) itu, tim meninjau Bandara Radin Inten II dan Pelabuhan Bakauheni di Lampung, serta Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno Hatta di Banten.

“Kita berharap kepada seluruh petugas untuk meningkatkan kinerja agar pelayanan pada masyarakat benar-benar ada perubahan dari tahun ke tahun,” harap politisi Fraksi Partai Golkar itu, usai peninjauan Bandara Soekarno Hatta.

Fakhry berharap, titik kepadatan arus mudik seperti bandara, pelabuhan, mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait. Peran dari pihak terkait, seperti BMKG, Basarnas, Kepolisian, maupun pihak-pihak lainnya diharapkan menunjang kelancaran mudik.

“Angkutan laut disarankan di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak agar tertib, jangan seperti tahun-tahun lalu. Penggunaan tiket online pun

harus dipastikan dapat mengurangi kepadatan pemudik. Pemisahan untuk pemudik sepeda motor dan kendaraan lainnya juga menjadi terobosan,” jelas Fakhry.

Politisi asal dapil Aceh itu pun meminta agar manifes penumpang kapal mendapat perhatian. Sehingga nantinya tak ada perbedaan jumlah penumpang yang masuk ke kapal, dengan data manifes yang dimiliki petugas.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR Rita Zahara mengingatkan kepada ASDP untuk memastikan kapal-kapal yang digunakan dalam mudik kali ini adalah kapal yang laik jalan. Selain itu, skill petugas pun harus diperhatikan.

“Saya mengharapkan tenaga SDM yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan penumpang, agar skillnya dapat diperhatikan. Tanggap dalam memberikan pelayanan kepada penumpang,” pesan politisi F-Gerindra itu.

Selain itu, politisi asal dapil Riau itu pun mengingatkan agar keamanan dan nyaman pemudik, khususnya pemudik



Komisi V DPR Salim Fakhry

yang menggunakan sepeda motor.

“Saya harapkan ASDP meninjau dengan sebaiknya-sebaiknya kondisi di lapangan, mulai dari pembelian tiket, kemudian saat masuk kapal, kenyamanan dalam kapal, hingga keluar dari pelabuhan,” tegas Rita.

Sementara itu, Direktur Utama ASDP Faik Fahmi mengatakan, untuk mudik tahun ini pihaknya menyiapkan 58 kapal untuk 2.416 trip. Ia memastikan seluruh kapal sudah dilakukan ramp check. Pihaknya pun sangat memperhatikan keselamatan para penumpang selama dalam perjalanan laut.

ASDP sudah mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, yang diakibatkan oleh kelalaian penumpang. Selain itu, pada tahun ini ASDP juga sudah menerapkan tiket online dan berjadwal, sehingga diharapkan mengurangi penumpukan penumpang. ■

(sif/sc). Foto: Sofyan/hr



Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie

DPR Berharap Penanganan Arus Mudik Tahun ini Lebih Baik

Saat meninjau berbagai aspek persiapan angkutan Lebaran 2017, Komisi V DPR RI menyambangi beberapa titik yang termasuk memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan dan penanganan arus mudik tahun 2017.

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, berdasarkan paparan yang telah disampaikan oleh beberapa instansi terkait yakni pihak Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Korlantas, pelaksanaan penanganan mudik tahun 2017 ini akan berjalan lebih baik dari sebelumnya.

“Beberapa antisipasi dan rekayasa sudah diatur agar kejadian pada tahun 2016 lalu tidak terulang kembali,” ucap Novita di Brebes, Jawa Tengah, Kamis (15/06/2017).

Dengan segala persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah, Novita berharap kepadatan arus mudik dapat terurai dan pelaksanaan angkutan Lebaran 2017 dapat berjalan dengan baik.

Senada dengan Novita, Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie juga mengatakan bahwa telah

ada perbaikan dari sistem penanganan dan pengamanan arus mudik Lebaran dari tahun sebelumnya.

“Tinggal bagaimana implementasi, sebab kemungkinan sekecil apapun harus diantisipasi. Kita sudah melihat beberapa persiapan dan antisipasi bila terjadi masalah, sarana dan prasarana juga sudah lebih baik. Diantaranya adalah

dengan membuat posko-posko terpadu yang dilengkapi dengan fasilitasnya, termasuk penanganan bagi pemudik yang sakit atau masalah kerusakan kendaraan pemudik. Bahkan untuk kondisi yang sulit, maka bisa dilakukan evakuasi dengan menggunakan Helikopter Basarnas,” pungkasnya. ■

(dep.mp), Foto: Dev/ahr

Komisi V Apresiasi Penataan Terminal Purabaya

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said memberikan apresiasi atas keberhasilan Kementerian Perhubungan dalam melakukan penataan di Terminal Purabaya, Surabaya dalam mengantisipasi arus mudik lebaran tahun 2017. Demikian disampaikan saat kunjungan kerja ke Surabaya, Kamis (15/06/2017).



Tim Kunspek Komisi V DPR bersama Kemenhub berdialog dengan salah satu penumpang di Terminal Purabaya, Surabaya

a berharap ini dapat dipertahankan sampai arus balik Lebaran. Mengingat dari sarana dan prasarana yang disiapkan juga sudah cukup baik. “Saya mengapresiasi Kementerian Perhubungan dan jajaran karena penataan terminal dan kesiapan sarana dan prasarana sudah cukup bagus. Berharap bisa dipertahankan sampai arus balik,” jelas Muhidin.

Apresiasi tersebut didapat usai Komisi V mendapatkan penjelasan langsung dari

Menhub menargetkan sebanyak 80 persen bus di Terminal Purabaya layak jalan pada masa angkutan lebaran. Menurutnya itu sudah mencukupi kebutuhan bus pada masa angkutan lebaran.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga ikut mendampingi rombongan Komisi V. Menhub menyebut sebanyak 24 persen angkutan bus di Terminal Purabaya belum layak. Oleh karena itu Menhub menegaskan bus yang tidak layak jalan tidak boleh beroperasi.

“Dari hasil ramp check (uji kelaikan) bus, 76 persen laik jalan dan 24 persen tidak laik jalan, bus yang belum laik jalan tidak boleh beroperasi,” tegas Menhub.

Menhub menargetkan sebanyak 80 persen bus di Terminal Purabaya layak jalan pada masa angkutan lebaran. Menurutnya itu sudah mencukupi kebutuhan bus pada masa angkutan lebaran.

Oleh karena itu untuk mencapai target tersebut Menhub meminta kepada pengelola terminal untuk membuka counter ramp check. “Masyarakat dihimbau untuk naik bus yang lulus uji ramp check angkutan lebaran, demi keselamatan bersama,” tutup Menhub Budi Karya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR Muhidin M. Said mengapresiasi keberhasilan Kementerian Perhubungan dalam melakukan penataan terminal dan kesiapannya dalam menyambut masa angkutan Lebaran 2017. Muhidin pada kesempatan yang sama juga meminta agar harga tiket bus selama masa angkutan lebaran dipantau secara ketat.

Usai meninjau Terminal Purabaya Bungurasih, Menhub dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Perak. Sebelumnya, Menhub juga meninjau kesiapan Bandara Juanda, Sidoarjo. ■

(hs/sc), Foto: Hendra/hr

Korpri DPR RI Gelar Bazar Dengan Harga Termurah

Sekjen DPR RI, Achmad Djuned meyakini bahwa harga dalam bazar yang digelar oleh Korpri Setjen DPR RI lebih rendah dibanding harga mall, pasar maupun harga bazar lainnya yang pernah digelar di gedung DPR RI sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka bazar Korpri Setjen DPR RI di Loby Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (19/6).

“Bazar yang digelar oleh Korpri Setjen DPR RI kali ini merupakan kali ketiganya sekaligus terakhir digelarnya bazaar Ramadhan di gedung DPR RI. Salah satu keunggulan korpri harganya lebih murah dibanding harga pasar dan harga dalam bazar terdahulu, namun dengan kualitas produk yang tidak kalah,” ujar Djuned, begitu ia biasa disapa.

Lebih lanjut Djuned menjelaskan bahwa bazar Korpri ini ditujukan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan para anggota Korpri, dan seluruh pegawai serta karyawan di lingkungan DPR RI terutama menjelang idul fitri. Peralnya, dalam kegiatan ini juga melibatkan beberapa organisasi yang ada di DPR RI, seperti Dharma wanita dan P3S (Persatuan pensiunan pegawai setjen) DPR RI yang ikut menggelar berbagai produknya.

Ditambahkan Mardian selaku Ketua Korpri sekaligus Panitia Bazar DPR RI, dalam bazar Korpri kali ini melibatkan 95 stand dari berbagai produk UKM (usaha kecil menengah). Tidak hanya UKM, dalam bazar kali ini Korpri juga bekerjasama dengan Bulog dan beberapa BUMN seperti Bank Mandiri.

“Kami bekerjasama dengan Bulog untuk menyediakan berbagai komoditi

seperti beras, gula, minyak, bawang merah, bawang putih, serta daging sapi, daging kerbau, yang dijual dengan harga cukup terjangkau, lebih murah dibanding harga pasar,” jelas Mardian.

Melihat manfaat yang diterima oleh para pegawai dan karyawan juga UKM yang ada, maka Djuned berharap bazaar ini tidak hanya digelar sekali dalam setahun. Melainkan juga dua kali dalam satu tahun. Tidak hanya itu, Djuned juga berharap agar ke depan Korpri juga dapat menggandeng beberapa kementerian terkait untuk menggelar pasar murah dengan produk yang menjadi bidang kerjanya. Sebut saja Kementerian Kelautan dan Pertanian dengan berbagai produk olahan ikan laut.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tengah menggalakan program Masyarakat Cinta Ikan yang menjual berbagai olahan produk dari ikan setiap jumat. Saya berharap agar Korpri bisa bekerjasama dengan Kementerian terkait untuk ikut membantu memasarkan produk tersebut, sehingga ketika istirahat pegawai dan karyawan tidak perlu lagi ke pasar untuk berbelanja,” papar Djuned.

Di akhir sambutannya, Achmad Djuned mengucapkan selamat berbelanja dan selamat bertransaksi, namun jangan lupa, belilah barang sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. ■

(ayu.mp). Foto: Runi/hr



Sekjen DPR RI, Achmad Djuned meninjau bazar Korpri Setjen DPR RI



Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned menerima LHP 2016 dari BPK

Raih WTP 8 Kali, Sekjen DPR Berharap Dapat Dipertahankan

Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned cukup bangga atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016. Ia berharap predikat tersebut dapat diteruskan di tahun 2016. Demikian disampaikan usai menghadiri acara penyerahan LHP 2016 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Selasa, (20/06/2017).

“Kita mendapatkan WTP sudah berturut-turut 8 kali. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mempertahankan prestasi ini,” ujar Achmad Djuned.

Dalam kesempatan tersebut, Djuned menjelaskan bahwa Setjen DPR telah berupaya mungkin untuk menjadikan laporan keuangan secara akuntabel dan profesional. Oleh karenanya ia menekankan kepada setiap unit atau bagian untuk dapat menyajikan laporan keuangan berdasarkan aturan standar akuntansi pemerintah.

“Ya, jadi kita memang taat pada hal-

hal yang menjadi kewajiban kita dalam administrasi keuangan. Jadi tata kelola keuangan administrasi kita lakukan sesuai apa yang menjadi aturan, dengan seperti itu kita bisa mendapatkan WTP,” tutur Djuned.

Untuk dapat mempertahankan WTP di tahun berikutnya, kepada setiap biro atau bagian pun dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara akuntabel sehingga mampu mempermudah kinerja biro keuangan dan inspektorat utama.

Pemeriksaan BPK atas LKPP ini sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang bertujuan

untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memiliki keyakinan LKPP 2016 telah menyajikan seluruh standar akuntansi pemerintahan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP atas LKPP tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang turut mendapatkan predikat WTP akan berupaya mempertahankan prestasi ini di tahun berikutnya.

Turut hadir dalam penyerahan ini, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara beserta seluruh jajaran pimpinan Kementerian dan Lembaga. Selain itu, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa juga berkesempatan memberikan sambutan. ■

(Ins/Sc), Foto: Andri/hr



Wakil Ketua DPR bidang Korinbang Agus Hermanto berdialog dengan para penumpang Kereta Api dan Pesawat, jelang mudik lebaran 2017 di Semarang, Selasa (20/6). Foto: Nadya



Tim Kunspek Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Muhidin M. Said didampingi Menteri Perhubungan meninjau kesiapan Bandara Juanda jelang lebaran 2017, Kamis (15/6). Foto: Hendra



Tim Kunspek Komisi X DPR dipimpin Wakil Ketua Abdul Fikri Faqih menggelar pertemuan dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di Medan, Kamis (8/6). Foto: Husen